"Strategi Pengembangan Rehabilitasi Mangrove melalau pemberdayaan masayarakat Lokal"

Oleh : Rawanana dan Sri Endang Setyawati.

Staf Pengajar Institut Pertanian Yogyakarta (INSTIPER)

ABSTRAK

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik,mempunyai fungsi ganda dan merupakan penyangga ekosistem pantai. Kenyataanya hutan mangrofve dari waktu ke waktu menunjukan gejala penurunban luas hal ini disebabkan banyak kawasan mangrove yang di konversi untuk peruntukan lain. Oleh karena itu upaya rehabilitasi perlu terus ditingkatkan. Ada beberapa kendala dalam rehabilitasi mangrove terutama tentang persepsi masyarakat yang masih minor, sehingga upaya rehabiltasi kurang memuaskan. Metoda pendekatan yang paling baik untuk rehabilitasi mangrove di pulau jawa adalah dengan melibatkan masyarakat lokal. Instiper telah membuktikan bahwa dengan pemberdayaan masyarakat lokal mam[u merahabilitasi pantai di pemalang

I.Pendahuluan

Hutan Mangrove merupakan ekosistemyang unik karena letaknya di peralihan antara laut dan darat. Ketika air laut pasang maka hutan mangrove merupakan bagian dari ekosistem darat. Dalam ek0osistem laut mengrove merupakan salah satu kompenen yang sangat vital , yang merupakan produsen bagi herbivora, Maupun sebagai habitat keanekaragaman biota laut, yang sebagian biota yang mencari makan (feeding) sebagian membutuhkan hutan mangrove sebagai tempat kawin (breeding). Dalam ekosistem darat hutan mangrove mempunya andil yang cukup pula terutama bagi masyarakat pantai, dari fungsi yang dibawakannya baik dari segi biologi, kimia fisika sosial-ekonomis maupun estetika

Dipandang dari aspek biologi, fungsi ekologis hutan mangrove adalah menjaga kestabilan produktifitas dan ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir. Tentu saja berkaitan dengan hutan mangrove sebagai habitat biota laut, sebagai habitat asuhan maupun pemijihan . Disamping itu didalam hutan mangrove banyak terdapat hewan – hewan muda yang akan dapat tumbuh kembang secara baik menjadi dewasa karena kaya

akan unsur – unsur hara dan terhindar dari hewan pemangsa (predator). Sedangkan dari aspek kimia hutan mangrove sebagai penyerap bahan pencemar, sebagai sumber energi bagi lingkungan perairan sekitarnya.

Dari aspek fisika hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung hutan pantai, pengendali banjir maupun menyusun meknisme hubungan antar komponen dalam ekosistem mangrove atau ekosistem lain seperti padang lamun dan terumbu karang. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi hutan mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan baik untuk bahan bakar, bahan kontruksi tempat memancing penyediaan makanan ternak untuk bahan pulp, kertas makanan, minuman, obat – obatan , peralatan rumah tangga produksi tekstil maupun yang lainnya (bengen 1998).

Keunikan fungsi gandha yang dimiliki oleh hutan mangrove ternyata belum mampu menggugah kesedaran masyarakat untuk melestarikan dan mengem,bangkan agar lebih baik, akan tetapi kerusakan dan sdegredasi hutan ini dari tahun ke tahun terus bertambah. Menurut Departemen Kehutanan (1982) luas hutan mangrove di Indonesia tinggal 3,70 ha (Nasution, 1998). Selama 16 tahun hutyan mangrove tyang hilang sebesar 0,55 juta hektar. Hasil Inventarisasi lahan kritis tanaman mangrove yang dilakukan oleh Dep. Kehutanan, diperkirakan luas hutan mangrove di p. Jawa sebesar 81,439 ha, dimana seluas 52.406 ha yang sebagian di jawa barat (33.433 ha) dan jawa tengah (18.931) dalam keadaan rusak.

Kerusakan hutan mangrove sebetulnya sudah dimulai secara besar – besaran pada penjajahan japang, dimana pemerintah penjajah pada waktu itu memperintahkan menebang hutan untuk mencukupi kebutahan bahan bakar kereta apai. Sedangkan pada wakyu –waktu selanjutnyadiakibatkan oleh alasan ekonomi, politik dan keamanant yang sangat buruik telah mengakibatkan kerusakan hutan mangroveterus berjalan. Akibatnya banyak hutan mangrove dikonvensi menjadilahan tambak, lahan pertanian pelabuhan, pemukiman dan lain-lain.

Upaya untuk merehabilitasi ekosistem hutan mangrove terus dilakukan agar fungsi ganda hutan mangrove segera pulih kembali. Beberapa konsep pengembangan rehabilitasi hutan mangrove mulai dibicarakan di antaranya adalah konsep regionalisme ekologis, maupun pemberdayaan masyarakat lokal atau dikenal dengan CBFM (Community

based forets management) atau sering dikenal denganCF (Commuinity Forestry). Dan ada konsep pengelolaan hutan yang sekarang dianut India yaitu JFM (Joint Forets Management). Sebetulnya konsep – konseo tersebut ingin memberikan andil yang besar terhadap masyarakat lokal (lokal community) karena masysrakat ini telah lama melakukan tardisi kehutanan dengan lingkungan setempat mulai lahir sampai dewasa.

II. PERSEPSI MASYRAKAT

Istilah masyrakat menurut Orstom 1992 adalah sekelompok orang orang yang terikat oleh suatu kepercayaan, nilai–nilai, norma–norma dan prefrensi–prefrensi yang mengatur tindakan kolektif, anggota kelompok relatif stabil, interaksi antar anggota kelompok diharapkan berlangsung tetrus menerus, dan relasi–relasi yang terjadi bersifat langsung dan multipleks.

Masyarakat pesisir secara sosiologi dibedakan menjadi 2 kelompok besar yaitu masyarakat yangbtermasuk dalam katagori tradisi agraris dan modern–industrial (Usman 1993). Kedua masyarakat tersebut mempunyai tipologi tersendiri dalam memandang dan memanfaatkan hutan mangrove yang ada. Pada masysrakat tradisional agraris mata pencaharian masyarakat lebih banyak dipertaruhkan pada ekosistem hutan mangrove, setiap perubahan ekosistem hutan mangrove dapat berpengaruh langsung terhadap ritme mata pencaharian, karena itu keharmonisan dengan hutan mangrove harus selalu dijaga. Hutan mangrove tidak boleh rusak ataupun tisdak boleh goyang, salah satu bentuk menjaganya adalah mengkaitkan hutan mangrove dengan sistem dan struktur sosial. Tanah misalnya bukan semata – mata dilihat sebagai lahan untuk menanam, tetapi lebih dari itu sesuatu yang memilikinilai sosial, sekaligus dipergunakan sebagai faktor pengikat sosial komunal.

Tendesi itu jauh berbeda dengan masyarakat modern–industrial. Masyarakat ini tidak bergantung keberadapan hutan mangrove tetapi sebaliknya mampu memanfaatkan hutan mangrove. Kemudian dengan kemajuanm ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat tipe ini mampu mempergunakan segala macam potensi hutan mangrove secara optimal bahkan dalam batasan–batasan tertentu sanggup merubahnya sehingga dapat menjadi asset yang memiliki nilai ekonomi

yang tinggi. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat tradisioanl agraris, anggota masysrakat ini juga mersa perlu menjaga hubungan keharmonisan dengan hutan, dan berusaha sedemikian rupa agar tidak rusak. Tetapi utnuk menjaganya tidak ada kaitannya dengan sistem dan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sistem sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu menapak pada jalur sendiri, yang tidak berkait dengan lingkungan hutan mangrove.

Dalam menanggapi rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah pespon yang dilakukan masyarakat bermacam-macam sebagian positif, negatif maupun abstain (Anonimous, 1998). Respon positif masyarakat biasanya timbul dari masyarakat yang telah mempunyai pengalaman tentang fungsi dan manfaat keberaadaan hutan mangrove. Sebagai contoh pada masyarakat Sinjai di Sulawesi Selatan, pada awalnya masyarakat tersebut membabat hutan mangrove untuk areal tambak, tetapi setelah periode waktu yang lama tambak konvensional (tambak tidak akrab lingkungan/tidak ada pohon mangrove) yang dibuat Produktifitasnya menurun tajam ditambah dengan abrasi yang tinggi. Oleh karena itu masysrakat tersebut mulai sadar dan akhirnya kembali ke hutan bakau (back to mangrove), sekarang berhasil dengan Bakau Rakyatnya. Demikian pula yang berhasil di desa Blendung dan Kendaldoyong Kabupaten Pemalang penduduknya yang dtanami bakau menghasilkan ikan , udang yang tinggi sedangkan tambak yang bersih dari tanaman bakau dibabat produktifitas tambaknya menurun bahkan banyak petambak udang yang bangkrut karena gagal panen. Pengalaman ini merubah persepsi masyarakat yang semula antipati menanam bakau menjadi pelestarian dan penyelamatan bakau.

Demikian juga respon negatif masyarakat terhadap rehabilitasi tanaman mangrove banyak dipengaruhi oleh persepsi yang telah mereka tangkap sebelumnya, walaupn tidak diketahui kepastian kebenarannya. Beberapa persepsi negatip tersebut diantaranya adalah. :

1. Keberadaban tanaman bakau/mangrove dipinggir tambak menyebabkan kematian udang. Tambak udang yang baik harus bersih dari tanaman bakau.
2. Seresah pohon bakau menyebabkan kematian ikan dan udan.
3. Pohon bakau tempat bersarang burung pemangsa ikan (predaton),

4. Pohon bakau penyebab kebocoran tangul tambak
5. Bibit bakau/tanaman mangrove mengganggu jaring nelayan dalam mencario ikan.
6. Hutan mangrove sebagai tempat bersarang/bersembunyi pencuri ikan.
7. Hutan mangrove menghalangi pengawasan terhadap kapal. yang dikawatirkan akan hilang/dicuri, dan lain -lain .

Persepsi – persepsi yang berkembang di masyarakat tersebut tentu saja sangat mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi mangrove , terutama di pantai utara pulau jawa. Oleh karena itu perencanaan dan strategi rehabilitasi mangrove yang akan direalisasikan harus dipertimbangkan beberapa faktor kendala (constrains)

III. BEBERAPA METODE PENDEKATAN

Beberapa pendekatan yang akan diuraikan dalam makalah ini yaitu pendekatan regionalisme Ekologis dan pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal atau dikenal dengan CBFM atau CF. Kedua pendekatan ini memopunyai kesemaan, yaitu dalam memandang masyarakat lokal sebagai aset yang menentukan dalam perencanaan dan keberhasilan rehabilitasi mangrove. Sedangkan perbedaanya sangat sekali, ibarat saudara kembar.

Regionalisme ekologis dalam konteks ini mengandung pengertian interaksi antara lingkungan dengan kegiatan manusia dalam pencarian identitas ekologis dan kulture kawasaan. Dari sistem pesisir secara garis besar dapat dikenali adanya elemen fisik berupa lingkungan alam dan lingkungan binaan (built enviroment) dan elemant non fisik yang berupa kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. Kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir sabagai kawasan pantai dalam bentuk kawasan bisnis dan komersial (central busnis distric), pasar (marcet) dan perluasan pelabuhan.

Kekuatan pendekatan perencanaan regionalisme ekologis ini adalah mengkaitkan tradisi ekologis masyarakat lokal terhadap hu tan mangrove yang menentukan pola rehabilitasi dan pemanfaatan daerah sekitar masyarakat tersebut.

Setrategi yang sekarang mendapat perhatian dalam rehabilitasi hutan mangrove dipantai utara jawa adalah pendekatan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini cukup relevan dan akurat, dengan

kondisi kemasyarakatan pulau jawa yang padat, multi etnis, multi madzab, dan multi persepi terhadap rehabilirasi hutan mangrove. Kelebihan konsep ini terletak pada porsi yang diberikan kepada masyarakat lokal, dimana masyarakat dilbatkan secara langsung dalam pemikiran pengembangan memformulasikan merencanakan, mengimplemasikan, mengevaluasi maupun memonitor. Model pendekatan (approach) ini merupakan suara bawah (graas root) atau dikenal dengan model bottom upapproach, sebagai kebalikan dari pendekatan dari atas (top down approach).

Setrategi pelibatan masyarakat dalam rehabiltasi mangrove adalah menerapkan insentif yang diharapkan dapat merangsang dan memacu usaha – usaha kegiatan lainnya diantaranya :

1. Pelatiha nketrampilan pengelolaan hutan mangrove, meliputi: manfaat dan fungsi hutan mangrove, pengenalan keanekaragaman jenis mangrove, kegunaannya , dan teknik silvikulturnya.
2. Penyuluhan tentang perundang – undangan yang berkaitan dengan mangrive dan tanah timbul. Materi yang diberukan diantaranya meliputi : UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, dan lain-lain.
3. Pelatihan intensifikassi perikanan akrab lingkungan materi yang diberikan : teknik Wanamina (sylvofishery), makanan alamiah, dll
4. Pelatihan intensipikasi pertanian
5. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat
6. Pembentukan koperasi dan managemennya
7. Penyebarluasan data dan informasi perencanaan rehabilitasi dan pengelolaan hutan mangrove
8. Pembuatan Dompet
9. Pemberian hak penggarapan tanaah-tanah negara agar dimanfaatkan semaksimum mungkin
10. Pemberian dan mempermudah permodalan

IV. SEKILAS REHABILITASI MANGROVE YANG DILAKUKAN INSTIPER

Dilatar belakangi kondisi tersebut diatas, INSTIPER DARMA PERGURUAN TINGGI-NYA (Pengajaran-Penelitian_Pengabdian) sejak tahun 1988 telah melakukan rehabilitasi mangrove, melalui salah satu

program yang dicanangkan di KKN (Kuliah Kerja Nyata). Pada awalnya kegiatan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Pemalang maupun Brebes, khusus di Kabupaten Pemalang di desa pesantren telah berhasi membuat hutan mangrove seluas 40 ha, dengan kondisi tegakan yang cukup bagus. Namun akhir-akhir ini hutan mangrove tersebut ditebang/dijarah, dan dikonversi menjadi lahan tambak. Hal ini disebabkan desakan sosial-ekonomi penduduk, ketidak pastian hukum, ketidak menentuan politik, dan reformasi.

Pengalaman menunjukan bahwa bekerja mono-disipliner tidak bisa menghasilkan out-put yang maksimal. Oleh karena itu dalam pengelolaan selanjutnya, INSTIPER melkukan beberapa koordinasi dan kerjasama yang mutualisme–harmonis dengan Dep. Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Tingkat II Pemalang, Wetland International dan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah V Jawa Tengah, dengan beberapa fasilitas dan infratuktur yang diberikan. Serta masyarkat lokal untuk memformulasikan model rehabilitasi mangrove dengan teknik wanamina. Hasilnya mulai dirasakan masyarkat lokal hal ini nampak banyak Pasanggem nelayan yang mengatakan kepada penulis " Mas sekarang ikan dan udangnya datang sendiri" sebagian yang lain juga komentar bahwa hasil tangkapannya meningkat, hal ini menunjukan bahwa rehabilitasi yang ada mulai dirasakan manfaatnya.

Namun demikian masih diperlukan penelitian dan pembangunan selanjutnya, terutama masalah informasi jenis atau campuran jenis pohon yang ada di dalam empang sebagai sumber dektrus, plangton, phytoplangton sebagai makanan alami. Disamping itu juga perlu dikembangkan beberapa model–model baru hasil inovasi agar pendapatan petani meningkat.

V. KESIMPULAN

Dari urain tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Luas hutan mangrove dari tahun ke tahun mununjukan gejela penurunan.
2. Degradasi hutan disebabkan banyak kawasan hutan yang dikonversikan masyarakat unutk peruntukan lain, dikarenakan faktor sosial–ekonomi, keselahan–persepsi masyarakat lokal dalam rehabilitasi mangrove.
3. Beberapa pendekatan dalam rehabilitasi mangrove, diantarnya adalah regionalisme ekologis dan pemberdayaan masyarakat lokal.
4. Metoda yang dikembangkan INSTIPER dalam merahabilitasi mangrove adalah melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan melibatkan kelompok tani untuk iktu merencanakan, mempormulasikan, mengelola dan mengevaluasi.

BAHAN BACAAN

Anonimous 1998. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Laboratorium Pusat Pengem,bangan Rehabilitasi Mangrove Instiper di Kabu[paten Pemalang Jawa Jawa Tengah. Kerjasama Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah V Jawa Tengah dengan INSTIPER Yogyakarta.

Bungen DG 1998. Setrategi pemberdayaan masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove . Makalah yang diasajikan Lokakarya Jaringan kerja pelestarian Mangrove. Pusdat pengembangan Rehabilitasi Mangrove (PPPM) INSTIPER Yogyakarta.

Colin Field 1996. Restoration of mangrove Ecosistem. The International Tropical Timber Organitations and The Society for manmgrove ecosistem s. Jhon Witzig & Company PTY Ltd. Mullumbimby.

Nasution Muslimin 1998. Pidato prngarah pada lakokaakrya Pembentukan Jaringan Ktrerja Pelestarian Mangrove Pantai Utara Jawa. Pengembangan Rehabilitasi Mengrave (PPPM) INSTIPER. Yogyakarta.

Priyatno Budi 1998 Pendekatan Regionalisme Ekologis dalam Perencanaan Kawasan Kota Pantai Tropis Indonesia. Makalah dalam Konfrensi Nasional Pusat Study Lingkungan ke 14. Badan Kerjasama Pusat Study Lingkungan Indonesia Hidup. Lembaga Penelitian ITS .Surabaya

Usman Sunyoto 1993. Perilaku sosial dan Konsevasi Lingkungan . akalah dalam penelitian konservasi Hutan, Tanah dan Air . Proyek pengembangan PSL dan Pusat Study Lingkungan dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta.